

Judul : Revisi UU Sisdiknas, sejarah dan sastra jadi mapel wajib
Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Sisdiknas

Sejarah Dan Sastra Jadi Mapel Wajib



Bonnie Triyana

ANGGOTA Komisi X DPR Bonnie Triyana mengusulkan agar sejarah dan sastra ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib dalam Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Alasannya, kedua pelajaran tersebut penting untuk menumbuhkan gairah membaca, melatih imajinasi, sekaligus meningkatkan kesadaran kognitif generasi muda.

Apalagi, ada fenomena brain rot, yakni kondisi di mana kesadaran kognitif tidak berkembang maksimal akibat dominasi konsumsi media sosial. "Itu karena pola generasi muda mengonsumsi media sosial. Lama-lama kesadaran kognitif tidak bisa lagi maksimal, karena terbiasa menerima konten yang hanya memuaskan dahaga emosinya," jelas Bonnie, Senin (18/8/2025).

Bonnie menegaskan, usulan ini merupakan komitmen fraksinya di Komisi X DPR untuk memperjuangkan sistem pendidikan yang bukan hanya menekankan capaian akademis, tapi juga pembentukan karakter dan daya pikir kritis.

Dalam UU lama, Pasal 37 memang mencantumkan daftar mata pelajaran wajib, namun

sejarah dan sastra tidak termasuk di dalamnya. Karena itu, Bonnie mendorong agar kedua pelajaran tersebut dimasukkan dalam RUU Sisdiknas yang saat ini sedang dibahas Panitia Kerja (Panja).

Bonnie lalumenyinggung rendahnya literasi membaca di Indonesia. Data 2025 menunjukkan, dari 212 juta penduduk Indonesia, 74,6 persen pengguna internet dan 50,2 persen di antaranya aktif di media sosial, mayoritas berasal dari Gen Z dan milenial.

"Kita menghadapi persoalan karena saat bicara literasi dan numerasi, penguatan fundamental kognitifnya nggak terjadi. Salah satu solusinya tentu membaca," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Ia mencontohkan temuan UNESCO yang menyebut hanya 0,001 persen orang Indonesia yang memiliki minat baca. Kondisi itu diperkuat dengan fakta masih adanya siswa SMP di Serang, Banten, yang belum bisa baca-tulis, bahkan menulis kata Indonesia Raya. Di Buleleng, Bali, tercatat 155 siswa masuk kategori tidak bisa membaca (TBM),

dan 208 siswa termasuk tidak lancar membaca (TLM).

"Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya menghidupkan kembali budaya membaca. Beberapa negara maju bahkan membatasi akses media sosial anak dan mewajibkan program membaca buku," ujarnya. Ia mencontohkan negara-negara Skandinavia yang mewajibkan siswa membaca buku, serta Australia yang membatasi media sosial bagi anak-anak dan remaja.

Sebagai tindak lanjut, Bonnie mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) agar lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan literasi. "Perpusnas harus bisa mencari akar persoalan ini dan menyelesaikannya secara lebih mendasar, tidak sekadar menjalankan program simbolis," tegasnya. ■ PYB